

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Penelitian

Secara umum buku teks pelajaran adalah buku yang berisi bahan-bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran. Buku teks ini menjadi rujukan para peserta didik dan guru di sekolah dan diharapkan dapat membantu mencapai tujuan pembelajaran. Sebagai buku teks pelajaran bidang studi atau mata pelajaran tertentu, mestinya buku ini adalah buku standar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Untuk itu, penulisan buku teks harus mengacu pada kurikulum yang berlaku. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud RI) Nomor 8 Tahun 2016, bahwa buku teks pelajaran merupakan perangkat operasional utama atas pelaksanaan kurikulum.

Berkaitan dengan mata pelajaran sejarah, penulisan buku teks pelajaran sejarah di sekolah dapat dikatakan mengikuti perkembangan penulisan sejarah (historiografi) atau perkembangan sejarah Indonesia. Salah satu ciri penting dalam masing-masing penulisan sejarah itu tidak terlepas dari jiwa zamannya. Menurut Purwanto dan Asvi Warman A (2005, hlm. 2) setiap jaman tentu akan menghasilkan suatu jenis penulisan sejarah dengan corak tertentu pula. Historiografi tidak bebas dari pengaruh jamannya, tidak dapat dilepaskan dari sosio-kultur kehidupan manusia pendukungnya. Tidak mengherankan visi masa lalu memainkan peranan penting dalam pencarian identitas nasional itu, sebagaimana diungkapkan oleh Klooster (1985, hlm. 28) bahwa “*Bij de speurtocht naar de nationale identiteit spelt de visie op het verleden een belangrijke rol*”. Hal itu dimaksudkan bahwa identitas nasional bersumber dari pengalaman sejarah bangsa itu. Hubungan antara pengalaman sejarah dan identitas nasional dijelaskan oleh Sartono Kartodirdjo sebagai berikut.

Sejarah merupakan cerita tentang pengalaman kolektif suatu komunitas atau *nation* di masa lampau. Pada pengalaman pribadi membentuk kepribadian seseorang dan sekaligus menentukan identitasnya. Proses serupa terjadi pada kolektivitas, yakni pengalaman kolektifnya yang membentuk kepribadian nasional dan sekaligus identitas nasionalnya (Kartodirdjo, 1993, hlm. 50).

Salah satu karya historiografi yang tidak terlepas dari jiwa zamannya dapat dilihat dari buku sejarah yang pernah diterbitkan pada masa Indonesia dikuasai oleh Belanda. Buku sejarah yang pernah disusun dan diterbitkan berjudul "*Leerboek Der Geschiedenis van Nederlandsch Oost-Indie*" yang ditulis oleh A.J. Eijkman dan F.W. Stapel tahun 1931. Pembahasan dalam buku teks pelajaran sejarah Hindia Belanda Timur (sekarang "Indonesia") itu mulai dari jaman kerajaan Hindu Buddha, kerajaan Islam, kedatangan bangsa-bangsa Barat sampai pada masa kekuasaan Belanda. Pada halaman akhir ada catatan tentang gubernur jenderal Belanda yang pernah berkuasa. Ditulis juga tentang beberapa kejadian atau peristiwa penting, seperti Kerajaan Majapahit, Perang Jawa (Perang Diponegoro), Perang Aceh dan kelahiran Budi Utomo.

Pendekatan penulisan sejarah dalam buku karya Stapel dan A.J. Eijkman terlihat *Belandasentris* dengan banyak menceritakan peran Belanda di tanah jajahan, yaitu Indonesia. Jika dilihat dari isi materi, bangsa Belanda menjadi "aktor atau pemeran utama" dan bangsa Indonesia menjadi "objek" dalam peristiwa/kejadian yang dinarasikan dalam buku tersebut. Menurut Mohammad Ali, model penulisan seperti itu menunjukkan bangsa Belanda sebagai pemilik daerah jajahan sedangkan bangsa Indonesia menjadi "abdi" yang harus mengabdikan kepada bangsa Belanda (Ali, 1995, hlm. 1). Buku teks sejarah versi Belanda ini kemudian menjadi rujukan dalam pembelajaran sejarah masa kolonial.

Buku yang ditulis oleh A.J. Eijkman dan F.W. Stafel tentu bukanlah sejarah bangsa Indonesia, melainkan sejarah kegiatan Belanda di Indonesia sesuai dengan visi kolonial pada waktu itu. Dalam penulisan sejarah model ini tentu mengandung pesan ideologi yang ingin disampaikan oleh kolonial Belanda, bahwa bangsa Eropa (Belanda) adalah bangsa yang kuat, superior, tidak mudah dikalahkan, pemimpin bagi rakyat jajahan, bangsa yang dipertuan, rakyat jajahan harus tunduk, patuh dan

mengabdikan pada kerajaan Belanda. Pesan ideologi yang dibangun ini menjadi identitas nasional kolonial Belanda pada waktu itu.

Pada perkembangan penulisan sejarah berikutnya, dapat dilihat ketika Jepang menulis tentang daerah kekuasaannya. Untuk menghilangkan pengaruh Belanda, pelajaran sejarah mendapatkan pengawasan yang ketat dari badan-badan propaganda dan kebudayaan bentukan Pemerintah Militer Jepang. Istilah *Indische Geschiedenis* diubah menjadi “Sejarah Indonesia”. Di sinilah publikasi historis zaman Jepang memiliki atmosfer yang berbeda dengan Belanda. Awalnya “nippocentrisme” berkembang ke skema nasionalisme. Semua itu menunjukkan arah perjuangan melawan dominasi Barat. Jepang berusaha untuk memperbaiki isi buku Sejarah dengan mengadopsi kejayaan masa lalu bangsa Indonesia, yaitu Kerajaan Majapahit dan perjuangan melawan dominasi Barat yang lebih otentik Indonesia (Klooster, 1985, hlm. 53). Isi materi pada buku sejarah yang diterbitkan pada masa pemerintahan militer Jepang ini sangat berbeda dengan yang ditulis bangsa Belanda yang menjauhkan dari peran bangsa Indonesia dalam sejarah bangsanya. Aiko Kurasawa yang pernah meneliti kekuasaan Jepang di Jawa mengatakan bahwa mobilisasi dan kontrol Jepang yang diarahkan untuk propagandanya telah sesuai dengan ideologi Jepang, namun demikian secara tidak langsung telah menggugah rasa kebangsaan Indonesia (Kurasawa, 2015, hlm. xlviii).

Memasuki masa kemerdekaan Indonesia, semangat penulisan buku teks sejarah bagi kepentingan sekolah sangat mendesak diperlukan. Tulisan sejarah dengan pendekatan *Indonesiasentris* telah muncul dengan nama “Sejarah Indonesia” sebagaimana yang disusun oleh pemerintahan militer Jepang pada waktu itu yang telah memberikan semangat baru dalam penulisan sejarah Indonesia. Muncullah buku-buku pelajaran sejarah, baik dalam bentuk buku ataupun diktat sebagai sumber pegangan guru dan siswa di sekolah. Namun buku yang diterbitkan pada awal kemerdekaan tidak memuaskan bagi kepentingan pendidikan kebangsaan Indonesia. Kebanyakan buku-buku yang diterbitkan masih banyak mengambil dari sumber sejarah Belanda, diantaranya mengutip karya F.W. Stapel. Buku ini tidak dapat membangun semangat nasionalisme. Dekolonisasi dalam penulisan sejarah Indonesia perlu dilakukan untuk mengungkapkan “sejarah dari

dalam” dimana bangsa Indonesia sendirilah memegang peranan pokok dalam sejarah (*Indonesiasentris*).

Untuk pertama kalinya, penulisan buku sejarah yang *Indonesiasentris* sebagai hasil forum Seminar Sejarah Nasional I di Yogyakarta tahun 1957 terlihat sudah ada kepentingan ideologi negara. Hal ini sebagaimana Klooster (1985, hlm 23) jelaskan bahwa telah ada rasa ketidakpuasan terhadap penulisan sejarah yang bercorak *Neerlandosentris* kolonialistik yang tidak mengungkapkan peran masyarakat Indonesia sendiri. Sementara itu di kalangan sejarawan telah berkembang kesadaran nasionalistik akan perlunya sejarah nasional Indonesia. Bagaimana pelajaran sejarah mampu membentuk kepribadian bangsa, menjadi pembahasan forum seminar sejarah ini. Materi lain yang dibahas dalam forum adalah sejarah, paham kebangsaan, dan watak bangsa Indonesia.

Perkembangan penulisan sejarah Indonesia berikutnya terjadi tahun 1963 dengan dibentuk panitia untuk melaksanakan penulisan kembali Sejarah Indonesia. Dikarenakan situasi dan kondisi bangsa Indonesia yang tidak kondusif akibat adanya ketegangan sosial dan krisis politik, panitia ini tidak dapat menghasilkan penulisan sejarah Indonesia yang baru. Penulisan sejarah nasional dilanjutkan pada Seminar Sejarah Nasional Kedua di Yogyakarta (1970) yang berhasil menyusun enam jilid buku teks Sejarah Nasional Indonesia. Buku ini dikenal dengan *Sejarah Nasional Indonesia (SNI) Jilid I s.d VI* atau dikenal juga dengan nama buku Babon yang terbit pada awal tahun 1975. Penulisan buku Babon ini menjadi rujukan utama bagi penulisan buku teks pelajaran sejarah, mulai tingkat sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas, termasuk perguruan tinggi. Buku teks pelajaran sejarah untuk SMA ditulis dalam tiga jilid dengan judul *Sejarah Nasional Indonesia Jilid 1, 2, dan 3* yang diketuai oleh Nugroho Notosusanto pada tahun 1977.

Perbaikan penulisan buku teks pelajaran sejarah tidak berakhir sampai tahun 1970-an, tetapi terus berlanjut sesuai dengan perkembangan sejarah penulisan sejarah (historiografi) Indonesia. Di era Reformasi, penulisan sejarah muncul dengan kata perbaikan, pelurusan, penulisan kembali, seperti “Pelurusan Sejarah Indonesia” (Adam, 2004), “Gagalnya Historiografi Indonesia” (Purwanto, 2006), dan “Titik Balik Historiografi di Indonesia” (Marihandono, 2008). Model penulisan sejarah Indonesia tersebut ikut mewarnai pada perkembangan penulisan buku teks

pelajaran sejarah yang terus berlangsung sampai sekarang (masa Reformasi di Indonesia).

Pelurusan penulisan mengandung dua arah kepentingan, pertama bagi kepentingan pendidikan yang bersifat politis dan kedua bagi pengembangan kaidah keilmuan sejarah itu sendiri. Hal itu sebagaimana diungkap Nordholt (2008) bahwa “Menulis sejarah terutama sejarah nasional bukan sekedar kegiatan intelektual atau akademis, tetapi juga kegiatan yang bermakna politis”. Darmawan dan Agus Mulyana (2016, hlm. 280-281) mengatakan “Dalam penulisan buku teks pelajaran sejarah ada tarik-menarik antara kebutuhan untuk memenuhi tuntutan pendidikan dalam rangka menjaga keutuhan, kedaulatan, dan kebanggaan sebagai anak bangsa dan di lain pihak sejarah harus diajarkan sebagaimana peristiwa itu terjadi.” Penulisan teks pelajaran sejarah yang bermakna politis seperti itu cukup beralasan karena sejarah sebagai media pendidikan diarahkan untuk membentuk jati diri sebagai bangsa, menjaga keutuhan, dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penulisan sejarah erat hubungannya dengan kekuasaan sehingga penulisan buku teks pelajaran sejarah kerap mengikuti arah kebijakan pemerintahan yang berkuasa. Hal itu sebagaimana diungkap oleh Tilaar (1995, hlm. 253) bahwa “apabila kita berbicara mengenai kurikulum, maka kita tidak terlepas dari politik”. Untuk itu, penulisan kembali buku teks pelajaran sejarah akan mengikuti pada perubahan kurikulum. Helius Sjamsuddin menjelaskan bahwa “Buku pengajaran sejarah di sekolah ditulis berdasarkan buku-buku sejarah (historiografi) yang telah ditulis oleh sejarawan profesional. Buku-buku sejarah itu biasanya berdasarkan perintah pemerintah” (Sjamsuddin, 2017, hlm. 3).

Perubahan politik dan pergantian pemerintahan dapat merubah suatu kebijakan. Mukarom (2016, hlm. 223) menjelaskan bahwa perubahan elite politik atau pemerintahan merupakan kondisi bagi perubahan sistem nilai, struktur kekuasaan, dan strategi menangani kebijakan. Memang kurikulum tidak lain dari salah satu alat kebijakan yang mengatur berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan. Meskipun demikian, menurut Agung S (2015, hlm 32) haruslah diingat bahwa pengaruh politik terhadap pendidikan bukan merupakan sesuatu yang unik dan eksklusif Indonesia, tetapi sesuatu yang terjadi juga di berbagai negara di dunia. Lagi pula perubahan politik dapat dianggap sebagai suatu tuntutan kebutuhan

politik masyarakat yang baru. Oleh karena itu, perubahan kurikulum adalah sesuatu yang tidak terhindarkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pasal ini jelas menunjukkan janji pemerintah terhadap dunia pendidikan. Lebih lanjut tujuan pendidikan nasional menjelaskan bahwa dengan pendidikan diharapkan dapat mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UUSPN No. 20 tahun 2003).

Tujuan pendidikan nasional yang tersurat dalam UU Sistem Pendidikan Nasional tersebut jelas menunjukkan kepada kita kualitas minimal yang harus dimiliki setiap warga Negara Indonesia. Dalam tujuan Pendidikan Nasional terdapat berbagai nilai kemanusiaan yang harus dimiliki seorang warga negara. Oleh karena itu, tujuan pendidikan nasional adalah sumber yang paling operasional dalam pengembangan budaya dan karakter bangsa (Hasan, 2012, hlm 11). Hal senada diungkapkan oleh Mulyana (2012, hlm. iv) bahwa:

Hakekat pendidikan adalah proses perubahan yang berkenaan dengan tingkah laku. Proses perubahan yang dimaksud adalah perubahan ke arah yang positif, misalnya dari tingkah laku yang jelek menuju pada yang baik. Pendidikan akan membawa manusia pada dirinya untuk menjadi orang yang bermartabat.

Tujuan pendidikan di atas erat kaitannya dengan pendidikan sejarah yang menekankan pada nilai. Said Hamid Hasan menjelaskan bahwa nilai merupakan ukuran untuk menilai baik dan buruk atau positif dan negatif, menyangkut tindakan, pendapat atau hasil kerja (Hasan, 1996, hlm. 114). Dalam konteks pendidikan, peristiwa dalam sejarah memberi pelajaran bagi kehidupan umat manusia. Untuk itu, peristiwa sejarah dilihat dalam konteks pendidikan sejarah dapat diinterpretasikan dengan pendekatan normatif, baik dan buruk atau benar dan salah.

Sementara itu Sjamsuddin (2017, hlm. 6-7) menjelaskan bahwa “apakah sejarah memiliki arti atau nilai? Sebagian sejarawan percaya bahwa makna atau nilai itu ada dalam teks atau historiografi, nilai itu benar-benar tertanam dalam teks. Oleh karena itu kita harus menemukan dengan interpretasi teks dan ditafsirkan dengan analisis teks kritis.

Pendidikan sejarah menjadi media yang menghubungkan antara pengalaman masa lampau dan persoalan kehidupan manusia kekinian. Materi sejarah yang dipelajari perlu diterapkan dalam kehidupan masa kini, agar menjadi lebih bermakna dan menjangkau kehidupan ke depan dari kehidupan sekarang. Menjangkau masa depan dalam sejarah bukanlah berarti meramal, tetapi di masa depan harus mampu berbuat yang lebih baik dari pelajaran masa kini. Mantan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill mengatakan “*The longer you can look back, the farther you can look forwards*” (Gardiner, 1961, hlm 285). Pendapat Churchill ini memperjelas pentingnya sejarah kepada kita, semakin jauh menengok ke belakang, maka semakin jauh pula kita menjangkau maju ke depan. Ismaun (1990, hlm 157) menjelaskan bahwa dengan sejarah, siswa mampu memahami perilaku manusia masa lampau, memahami perilaku manusia dewasa ini, dan merencanakan keadaan masyarakat yang akan datang secara lebih baik. Berdasarkan pendapat ini, materi yang dibahas dalam buku teks diseleksi dan harus sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Pendidikan sejarah menguatkan pada kesadaran sejarah. Pada diri manusia ada ingatan tentang apa yang pernah ada dan harapan apa yang akan ada atau terjadi di masa depan. Dengan ingatan atau kenangan itu kita diperkenalkan secara tidak langsung pada keadaan yang telah lampau. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh ahli filsafat, Bertrand Russel:

“Pengetahuan langsung yang berhubungan dengan memori adalah sumber dari semua pengetahuan kita tentang masa lalu; kesimpulannya tanpa memori itu tidak akan ada pengetahuan tentang masa lalu karena kita tidak pernah tahu untuk menyimpulkan tentang sesuatu masa lalu itu” (Russel, 2002, hlm 49).

Pemerintah mempercayai bahwa pendidikan sejarah berkontribusi secara langsung dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian, sejarah nasional wajib dipelajari dan diajarkan kepada warga masyarakatnya (Jarolimek,

1986, hlm. 146). Pada perkembangan masa Reformasi, pendidikan yang diarahkan pada pembangunan identitas bangsa Indonesia yang berbudaya dan beradab dengan menjunjung nilai-nilai moral bangsa, telah masuk pada bagian *Program Revolusi Mental* sebagaimana diungkapkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental berikut ini.

Dalam rangka memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia dengan melaksanakan Revolusi Mental yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila.

Untuk mendukung pada program Revolusi Mental, Pemerintah mengembangkan dalam bentuk Program Nawacita yang terbagi dalam tiga bidang, yakni berdaulat dalam politik, berkemajuan dalam ekonomi dan berkepribadian dalam budaya dengan sembilan program prioritas utama sebagai berikut.

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas-aktif.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui program Indonesia Pintar dengan wajib belajar 12 tahun bebas pungutan. Dan program Indonesia Sehat untuk peningkatan layanan kesehatan masyarakat. Serta Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera dengan mendorong program kepemilikan tanah seluas sembilan juta hektar.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi dan domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui penataan kembali kurikulum pendidikan nasional.
9. Memperteguh Keb-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui penguatan kebhinekaan dan menciptakan ruang dialog antar warga (Soleman, M dan Mohammad Noer, 2017, hlm. 1964).

Persoalan pada kehidupan sekarang (masa Reformasi), Indonesia menghadapi tantangan kehidupan yang jauh dari harapan, khususnya dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bagaimana tidak,

Wawan Darmawan, 2019

PENDIDIKAN NASIONALISME DALAM PENULISAN BUKU TEKS PELAJARAN SEJARAH SEKOLAH MENENGAH ATAS MASA ORDE BARU DAN REFORMASI DI INDONESIA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

konflik antar etnik, antar golongan, antar suku, dan antar agama (konflik SARA) kerap mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita dapat lihat dari konflik yang pernah terjadi di beberapa daerah seperti di Aceh, Ambon, Kalimantan, Lampung, Papua, dan beberapa daerah lainnya di Indonesia. Apabila diperhatikan, konflik yang menggejala ini menunjukkan kurang berfungsinya nilai-nilai pendidikan nasionalisme. Nilai cinta tanah air seolah memudar dengan munculnya beberapa daerah yang ingin lepas dari wilayah NKRI, seperti Aceh, Maluku, dan Papua. Wilayah propinsi Timor Timur telah lepas lebih dulu dari wilayah Indonesia dan sekarang menjadi Negara Timor Leste. Begitu juga nilai identitas etnisitas dan religius yang sempit semakin menguat yang direfleksikan oleh perilaku moral yang menodai nilai-nilai berbau SARA dan ke-bhinekaan. Masalah integrasi ini, Rochiati Wiriaatmadja mengatakan peristiwa yang terjadi itu telah menyebabkan kita berpikir lagi tentang apa yang gagal kita lakukan atau tidak kita lakukan sebagai pendidik, khususnya pendidik sejarah, di masa lampau (Wiriaatmadja, 2002, hlm. 218). Sementara itu Winarti (2016, hlm. 2) menyebutnya, peristiwa di atas dengan perilaku moral yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar masyarakat yang beradab.

Pendidikan merupakan upaya terencana dalam mengembangkan potensi anak didik sehingga mereka memiliki sistem berpikir, nilai, moral, dan keyakinan yang diwariskan masyarakatnya dan mengembangkan warisan tersebut ke arah yang sesuai untuk kehidupan masa kini dan masa mendatang. Pendidikan dianggap sebagai alternatif yang bersifat preventif karena pendidikan membangun generasi baru bangsa yang lebih baik. Sebagai alternatif yang bersifat preventif, pendidikan diharapkan dapat mengembangkan kualitas generasi muda bangsa dalam berbagai aspek yang dapat memperkecil dan mengurangi penyebab berbagai masalah bangsa yang ramai diperbincangkan. Memang diakui bahwa hasil dari pendidikan dampaknya tidak dapat dilihat dalam waktu yang singkat, perlu proses, perlu pembiasaan sehingga memiliki daya tahan dan dampak yang kuat di masyarakat (Darmawan, 2016a, hlm.4).

Salah satu cara yang paling efektif dan preventif untuk mengurangi permasalahan bangsa adalah dengan menerapkan pendidikan nasionalisme di sekolah melalui pendidikan sejarah. Pengetahuan dan pemahaman siswa mengenai masa lampau diharapkan dapat menumbuhkan kemampuan dan kearifan untuk

menghadapi kehidupan yang sedang dijalani, menumbuhkan dan memiliki kesadaran kebangsaan sebagai alat pemersatu bangsa. Dalam hal ini, memahami sejarah tidak hanya mengetahui peristiwa yang sudah terjadi, tetapi memiliki proyeksi agar tidak mengulang kesalahan yang sama. Belajar sejarah merupakan cara atau jalan menjadikan bijaksana sebelum kejadian berlangsung, yang sering disebut sebagai belajar *dari* sejarah (Sjamsuddin, 2012, hlm. 285). Sebelumnya Carr (1964, hlm. 30) menyatakan, bahwa “*history is a continuous process of interaction between the historian and his facts, and unending dialogue between the present and the past*”. Di sini sejarah mengandung bahwa kehidupan sekarang tidak akan lepas dari kehidupan masa lampau.

Untuk itu hal yang berkaitan dengan sejarah, Nora (1989, hlm. 8-11) menyiratkan bahwa sejarah adalah representasi masa lampau, sedangkan ingatan menggambarkan semua kemungkinan masa lampau-termasuk kemungkinan mengingat, melupakan atau bahkan menghidupkan kembali bagian-bagian yang hilang dari masa lampau. Demikian juga Wineburg (2006, hlm. vii) menjelaskan bahwa dengan mempelajari sejarah, kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat di masa lalu jangan sampai terulang kembali, tetapi apa yang telah dicapai dari masa lalu yang baik perlu dicontoh dan ditingkatkan. Untuk itu, hal yang ditekankan dari pendidikan sejarah ialah pendidikan nilai. Menurut Winarti (2016, hlm. 2) ada banyak nilai yang dapat ditanamkan dalam pendidikan sejarah, antara lain: nilai informatif, nilai budaya, nilai etika, nilai nasionalisme, dan sebagainya. Sementara itu Wiriaatmadja (2002, hlm. 146) menjelaskan bahwa belajar sejarah adalah belajar dengan berorientasi kepada pengembangan potensi berpikir siswa yang menyentuh emosinya dalam hubungan antar manusia, menyadarkan dirinya akan bangsa dan tanah air. Selain itu, menghargai keanekaragaman bangsa-bangsa dan kebudayaan-kebudayaan yang ada dalam melengkapi sisi kemanusiaannya. Untuk itu, benar jika Wineburg (2006, hlm. 6) menjelaskan bahwa sejarah perlu diajarkan di sekolah karena memiliki potensi untuk menjadikan manusia yang memiliki sikap berkeperimanusiaan.

Berkaitan dengan proses pembelajaran, agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang dikehendaki memerlukan berbagai media yang menunjang proses pembelajaran. Salah satu media tersebut adalah buku teks.

Crowther (1995, hlm. 1234) menjelaskan “*a book giving instruction in a subject used especially in schools*”. Di sini dikatakan bahwa buku teks memberikan petunjuk dalam pelajaran di sekolah. Buku teks merupakan bagian yang amat penting dari proses pembelajaran yang harus dapat dipahami (Prastowo, 2011, hlm. 169).

Buku teks pelajaran sejarah adalah salah satu sarana belajar yang biasa digunakan di sekolah. Buku teks berfungsi untuk menunjang proses pembelajaran. Biasanya buku teks ditulis oleh para pakar atau para ahli dalam bidang sejarah. Di Indonesia, biasanya buku teks sejarah ditulis oleh dosen, guru, militer atau orang yang menaruh minat terhadap sejarah. Buku teks sejarah yang berbentuk buku pelajaran yang beredar di sekolah-sekolah, merupakan sumber utama yang selama ini digunakan oleh guru-guru sejarah dan peserta didik untuk mengembangkan proses pembelajaran di kelas (Supriatna, 2007). Buku-buku yang diterbitkan oleh berbagai penerbit itu selalu mencantumkan kata-kata “sesuai dengan kurikulum yang berlaku” (Hasan, 2000. hlm. 28). Hal ini mengindikasikan bahwa memang buku-buku tersebut merupakan sumber utama bagi peserta didik yang telah sesuai dengan tuntutan kurikulum.

Terdapat permasalahan dalam buku teks yang digunakan pembelajaran sejarah di sekolah saat ini. Masalah tersebut terdapat pada dua aspek, yaitu penggunaan buku teks sejarah yang tidak optimal dan konten/isi materi buku teks. Penggunaan buku teks sejarah tidak optimal dimana guru maupun siswa kurang memanfaatkannya secara maksimal. Buku teks hanya digunakan siswa sebagai alat bantu mengerjakan tugas dari guru sejarah, sebagai bahan persiapan ulangan atau ujian (UTS dan UAS) dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Dalam beberapa kasus yang ditemui di lapangan, buku teks dapat membelenggu guru dan siswa. Materi yang disampaikan terpaku pada buku teks tanpa ada pengembangan atau referensi lainnya. Belum lagi dalam buku teks pelajaran sejarah selalu mencantumkan sesuai dengan kurikulum yang diberlakukan saat itu, padahal isinya sama saja dengan isi buku sebelumnya (Hasan, 2000).

Dari aspek isi, buku teks yang selama ini digunakan oleh guru-guru dalam proses pembelajaran di kelas lebih banyak memuat fakta-fakta yang membuat siswa-siswa terbenam dalam lautan fakta (Darmawan, 2016b, hlm. 5080). Buku-

buku sejarah yang ada sarat dengan muatan fakta (angka tahun, nama pelaku, tempat kejadian, dan proses peristiwa dan ditutup dengan akhir peristiwa) yang digambarkan secara kering. Selain hal tersebut, jika ditinjau dari sudut pandang materi atau peristiwa, penulisan buku teks sejarah ini sedikit mengandung makna pelajaran yang dapat diambil oleh peserta didik. Untuk itu, Hasan (1999, hlm. 26-27) mengungkap kembali bahwa dalam paradigma baru pendidikan sejarah, pemahaman cerita dan hafalan fakta tidak ditinggalkan, tetapi pemahaman cerita dan hafalan fakta dapat diperluas menjadi pengetahuan dan pemahaman mengenai cara berpikir sejarah, keterampilan sejarah, dan dapat mengeksplorasi nilai-nilai serta penerapan nilai-nilai terpilih untuk kehidupan masa kini serta masa depan. Dengan mengacu pada keanekaragaman penulisan buku teks pelajaran sejarah, tujuan pelajaran sejarah mengutamakan cara berpikir dan keterampilan sejarah sebagai kemampuan dasar peserta didik untuk belajar berbagai peristiwa sejarah. Tujuan pendidikan sejarah tersebut ada pada Kurikulum 2013, antara lain disebutkan agar peserta didik memiliki kemampuan mengembangkan kemampuan berpikir historis yang menjadi dasar untuk kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, inspiratif, dan inovatif.

Buku teks pelajaran sejarah adalah buku yang ditulis oleh penulis buku dengan dasar pijakan dari kurikulum sejarah. Dalam Kurikulum 2013, mata pelajaran sejarah memiliki Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) yang merupakan materi minimal yang harus disampaikan oleh guru dalam proses pembelajaran. Standar minimal materi yang telah ditetapkan dalam kurikulum, memberikan ruang yang bebas pula bagi penulis buku untuk berinovasi dalam membuat narasi sejarah, asal tidak keluar dari kompetensi yang diinginkan dalam kurikulum. Karena kurikulum merupakan kebijakan politik, maka materi yang ditulis dalam buku teks sejarah haruslah sesuai dengan kebijakan atau kepentingan politis pemerintah yang berkuasa. Nordholt (2008, hlm. 15) mengatakan buku-buku teks sejarah di sekolah menjadi dasar dalam mengembangkan kesadaran sejarah nasional sesuai versinya negara. Begitu juga Sjamsuddin (2007, hlm. 196-197) menjelaskan bahwa:

Penafsiran dalam buku teks sejarah selain secara akademis harus dapat dipertanggungjawabkan, perlu memperhatikan visi atau kebijakan pendidikan dan/atau politik yang berlaku secara nasional. Semangat zaman

(*zeitgeist*) dari tujuan kebijakan pendidikan atau politik mewarnai buku-buku teks sejarah, biasanya dituangkan dalam kurikulum. Hanya karena menyangkut kebijakan pemerintah, jangan sampai buku teks tersebut menjadi “alat propaganda rejim” yang berkuasa.

Untuk mengetahui mengapa adanya perubahan pemerintahan selalu diikuti oleh perubahan kurikulum, khususnya kurikulum mata pelajaran sejarah, di sini Mulyana dan Darmiasti (2009, hlm. 70) menjelaskan bahwa:

Pelajaran sejarah merupakan mata pelajaran yang tujuannya memiliki kaitan dengan pembentukan watak bangsa. Berkaitan dengan tujuan yang demikian, membuat tujuan pelajaran sejarah akan berkaitan dengan ideologi politik kenegaraan. Negara sering memandang bahwa pembentukan watak kebangsaan warganya merupakan kewajiban negara. Kewajiban itu kemudian dilakukan melalui pendidikan dan diantaranya dilakukan dalam mata pelajaran sejarah. Dengan demikian tujuan pelajaran sejarah menjadi ideologis.

Buku teks sejarah yang mengacu pada struktur kurikulum yang berlaku, menandakan buku teks ini sarat dengan muatan ideologi dan kepentingan tertentu. Menurut Hasan (2007, hlm. 182), kurikulum pendidikan sejarah dipersiapkan untuk kehidupan bangsa, memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang bangsanya beserta keseluruhan identitasnya. Pesan-pesan negara dalam kurikulum tidak dapat dihindari karena negara sebagai penguasa memiliki kuasa atas kepentingan sistem persekolahan.

Buku teks pelajaran sejarah merupakan bagian dari karya historiografi. Narasi sejarah yang ditulis dalam buku teks merupakan hasil dari interpretasi atau pengembangan dari Kompetensi Dasar (KD) yang ada dalam Kurikulum 2013. Marwick (1989, hlm. 212) menjelaskan bahwa pada saat penulisan narasi, interpretasi akan dipengaruhi oleh subjektivitas penulis, sebagaimana lazimnya dalam penulisan sejarah, seorang sejarawan akan dipengaruhi oleh sikap, asumsi, mental dan nilai-nilai yang dimilikinya.

Sejarah yang ditampilkan di sana lebih banyak menekankan pada peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa adalah kenyataan atau kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau (Ismaun dkk, 2016, hlm. 21). Namun demikian tidak semua peristiwa yang terjadi di daerah tercatat dalam buku teks. Hal itu disebabkan peristiwa yang dianggap penting untuk ditampilkan adalah peristiwa-peristiwa yang dianggap sebagai peristiwa nasional atau lokal yang menasional dan dianggap

memiliki nilai-nilai nasionalisme. Penetapan suatu peristiwa dianggap sebagai suatu sejarah nasional lebih bersifat politis daripada akademis. Dalam hal ini peran negara amat penting dalam menentukan kategori sejarah nasional tersebut. Rekonstruksi sejarah nasional ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah membuat legitimasi untuk identitas nasional yang memberikan penguatan terhadap terbentuknya negara sebagaimana diungkap Heyking (2004, hlm. 1) bahwa “Sejarah memiliki tempat istimewa dalam penciptaan identitas nasional”. Sementara itu Sutherland (2008, hlm. 38) mengatakan penentuan mereka masuk dalam kategori sejarah nasional dapat dilihat, apakah mereka membantu atau menghambat tujuan nasional.

Berdasarkan pada landasan filosofis dan politis yang mendasari penyusunan kurikulum, Hasan (1996, hlm. 63) menjelaskan bahwa landasan politis berhubungan dengan keputusan pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan. Dalam kaitannya dengan pendidikan sejarah sebagai bagian dari kebijakan politik terlihat ketika pemerintah melakukan seleksi atau menentukan materi sejarah yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Menurut Mulyana (2012, hlm. v) dalam wilayah pendidikan telah terjadi ideologisasi sejarah. Sejarah diinterpretasikan dengan dasar ideologi tertentu atau ideologi yang ditafsirkan oleh pemerintah. Selanjutnya Utami (2014, hlm. 2) menjelaskan implikasi dari kuatnya kepentingan negara dalam pendidikan sejarah adalah pelajaran sejarah yang bersifat dogmatis daripada memberikan nalar kritis dari kearifan masa lalu. Pelajaran sejarah diberikan sebagai indoktrinasi ideologi dan kepentingan negara.

Penafsiran sejarah sebagaimana dijelaskan di atas bersifat sentralis. Negara menciptakan suatu narasi besar atau arus utama dalam historiografi. Narasi besar ini mencoba mempengaruhi cara orang kembali membangun masa lalunya (Nordholt, 2008, hlm. 4). Rekonstruksi sejarah yang melekat pada masyarakat yang lebih luas adalah interpretasi yang dibuat oleh negara. Negara jika perlu akan membangun memori kolektif tentang sejarah bangsanya sesuai versinya Negara dalam benak masyarakat. Ingatan masyarakat tentang masa lalu negaranya ini lebih diarahkan pada standar interpretasi yang dibuat oleh negara. Di sini keseragaman memori dicoba dibangun oleh pemerintah.

Konstruksi sejarah mengenai berbagai peristiwa sejarah mengandung makna yang ada di balik wacana dalam buku teks. Sejarah sesungguhnya dapat dianggap sebagai suatu sistem wacana yang ingin mengungkapkan tentang sesuatu (Abdullah, 2005, hlm. xviii). Hanya wacana sejarah itu terikat oleh konteksnya. Munslow (2001, hlm. 7) mengatakan bahwa dalam penulisan sejarah adalah mustahil memisahkan sejarawan dari pembentukan makna melalui penciptaan sebuah konteks yang diambil dari fakta-fakta. Penulisan sejarah bukan hanya bagaimana mengorganisasi evidensi, tetapi juga memperhitungkan retorika, strategi-strategi penjelasan metaforis dan ideologis yang digunakan sejarawan. Artinya bahwa setiap tulisan itu sudah mengandung ideologi dari penulis itu sendiri. Tetapi ingat, Roskin dkk (2016, hlm. 33) mengatakan “ideologi tidak pernah bekerja persis sama seperti apa yang diinginkan oleh penggagas ideologi tersebut”. Bisa saja ideologi itu diselewengkan oleh pemegang kekuasaan (Aziz dan Syarief Hidayat, 2016, hlm. 223). Ideologi sering menjadi alat kekuasaan dari kelas yang dominan untuk mempertahankan status quo. Rezim Orba, misalnya, dengan format politik otoriter birokratik dan militerismenya sangat intensif melakukan penguatan terhadap dirinya dan pelemahan terhadap kekuatan rakyat dan *civil society* di pihak lain. Hal ini sebagaimana Purwanto (2008, hlm. xxv) ungkapkan bahwa:

Jika rezim sebelumnya membangun sejarah Indonesia sebagai hasil dari perbenturan antara kolonialisme dan imperialisme melawan nasionalisme Indonesia dengan Soekarno sebagai pusatnya, maka Orde Baru melihat sejarah Indonesia sebagai hasil dari perjuangan antara pendukung dan penentang Pancasila dengan menempatkan militer sebagai faktor penentu.

Selanjutnya Purwanto (2008, hlm. xxi) menyebutkan pesan normatif dan pesan ideologis merupakan dua hal yang selalu muncul dalam setiap historiografi nasional, baik sebagai hasil dari subjektivitas personal, generasi maupun subjektivitas rezim, tidak terkecuali historiografi Indonesia. Namun demikian, penanaman ideologi yang begitu kuat itu harus memperhatikan aspirasi nasionalisme dari bawah atau daerah. Hal tersebut sebagaimana diungkap oleh Zuhdi (2017, hlm. 30-31) bahwa:

Supaya mempunyai daya tarik kuat maka dihembuskan dengan mitos-psikologis, akan tetapi sering nasionalisme Negara dioperasikan nasionalisasikan terlalu kuat sehingga mendominasi minoritas dan daerah pinggiran. Dalam pengalaman sejarah Orde Baru, mitos Negara dibangun

terlalu kuat sehingga nyaris tidak memberi kesempatan bagi aspirasi kelompok minoritas dan penduduk pinggiran. Mitos persatuan dan kesatuan bangsa, misalnya ternyata tidak mampu meredam permasalahan ancaman disintegrasi, baik sosial maupun politik, baik horizontal maupun vertikal.

Jika hal itu terjadi, keinginan untuk menjadikan historiografi sebagai penyelamat bangsa sukar untuk diwujudkan, tetapi sebaliknya berubah menjadi ancaman secara terus menerus bagi masa depan bangsa. Lebih jauh Purwanto (2008, hlm. xxii) mengatakan “Ketika historiografi hadir sebagai representasi kuasa kediktatoran minoritas, yang terjadi massa kehilangan tempat dalam sejarah dan juga kehilangan masa lalu mereka sebagai sebuah naratif”. Untuk itu, nasionalisme negara mestinya tumbuh dari masyarakat.

Begitu pentingnya nilai pendidikan sejarah diharapkan dapat meningkatkan kesadaran nasional sebagai suatu bangsa, menanamkan rasa cinta tanah air, dan merangsang kemampuan daya cipta dan pembaharuan dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan serta membina kepribadian bangsa melalui proses perpaduan dan kepribadian jiwa, semangat, dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda. Melihat tujuan ini, sudah jelas bagaimana Pemerintah atau negara memasukan ideologi dalam pendidikan sejarah. Salah satu media penanaman ideologi itu masuk dalam materi buku teks pelajaran sejarah. Mulyana dan Darmiasti (2009, hlm. 79) mengungkapkan bahwa penulisan sejarah memberikan gambaran peristiwa harus berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Pelajaran sejarah adalah pelajaran yang bertujuan untuk pembentukan watak bangsa sehingga berkaitan dengan ideologi kenegaraan. Pendapat itu sesuai dengan penjelasan Abdullah dan Abdurrahman S (1985, hlm. 27-29) yang membagi tiga jenis penulisan sejarah Indonesia, yaitu sejarah ideologi, sejarah pewarisan, dan sejarah akademik. Sejarah ideologi memandang pembentukan watak kebangsaan merupakan kewajiban negara sehingga sejarah yang dipelajari bukan demi pengetahuan masa lampau tetapi demi lambang yang diadakan untuk masa kini. Sejarah juga dapat membantu siswa sebagai kekuatan dalam melawan ideologi palsu sebagaimana diungkap oleh Loewen (2009, hlm. 25):

Thus far we have noted four reasons why history is an important course:
 1. *History helps students be better citizens by enabling them to understand what causes what in society.*

2. *History helps students become critical thinkers. Doing historiography (and learning that word) is part of that process.*
3. *History helps students muster countervailing power against those who would persuade them of false ideologies.*
4. *History helps students become less ethnocentric.*

Dengan demikian penulisan sejarah yang berideologis adalah pencarian arti subjektif dari peristiwa sejarah sehingga nilai politik yang dibangun akan lebih kuat. Untuk itu, bagaimana perbedaan pendekatan, bentuk dan penerapan ideologisme, khususnya nilai ideologi nasionalisme sebagai bagian dari pendidikan politik diterapkan oleh pemerintahan Orde Baru dan pemerintahan Reformasi dalam buku teks pelajaran sejarah SMA, menarik untuk diteliti. Dua masa yang berbeda antara ciri pemerintahan Orde Baru dan pemerintahan Reformasi, dimana “Orde Baru” tidak lepas dari kekuasaan pemerintahan Soeharto yang otoriter-sentralistik dan pemerintahan “Reformasi” yang mengusung prinsip demokrasi dengan mengedepankan kebebasan berpendapat/berpolitik.

Untuk itu perlu dikaji, seberapa besar representasi pendidikan nasionalisme yang muncul dalam penulisan buku teks sejarah di SMA menurut dua pemerintahan yang berbeda. Representasi pendidikan nasionalisme yang bagaimana yang sering muncul dalam penulisan buku teks sejarah SMA masa pemerintahan Orde Baru dan pemerintahan Reformasi, atau di antara kekuasaan otoriter yang sentralis dan kekuasaan demokratis yang bebas berpendapat. Pemerintahan Reformasi pernah membuat kebijakan melalui draft Kurikulum 2004 dengan meniadakan materi “Pemberontakan PKI Madiun” dan peristiwa “Gerakan 30 September” dengan menghapus PKI di belakangnya. Rencana kebijakan berdasarkan draft Kurikulum 2004 itu menimbulkan gejolak di masa masyarakat dan pada akhirnya, pemerintahan tidak jadi memberlakukan perubahan kurikulum melalui Kurikulum 2004. Permasalahan ini menunjukkan, meskipun pemerintahan Reformasi menjunjung kebebasan berdemokrasi, kebebasan berpendapat, ternyata untuk hal-hal tertentu tidak dapat melakukan perubahan pada kemapanan ideologi (memori kolektif) yang telah dibangun pada masa pemerintahan sebelumnya (Orde Baru). Permasalahan ini pula yang menjadi menarik untuk dikaji, mengapa kebijakan pemerintahan yang baru di era Reformasi tidak begitu mudah mengubah kebijakan pemerintah sebelumnya, terutama dalam penulisan sejarah dalam buku teks

pelajaran sejarah. Apakah penulisan buku teks pelajaran sejarah untuk SMA pada masa Reformasi mengikuti representasi materi masa pemerintahan Orde Baru? Atau, adakah pergeseran representasi materi yang menjadi ciri pada masa pemerintahan Reformasi yang berbeda dengan masa pemerintahan Orde Baru? Permasalahan tersebut menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam penelitian disertasi ini.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang permasalahan yang telah diungkapkan di atas, masalah utamanya adalah “Bagaimana pendidikan nasionalisme muncul dalam penulisan buku teks pelajaran sejarah untuk Sekolah Menengah Atas?” Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti membatasi dan merumuskan masalah dalam bentuk beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Mengapa pendidikan nasionalisme perlu ditanamkan melalui buku teks pelajaran sejarah?
2. Bagaimana penulis sejarah menjabarkan wacana pendidikan nasionalisme dalam buku teks pelajaran sejarah SMA?
3. Bagaimana konstruksi wacana pendidikan nasionalisme yang ditanamkan dalam penulisan buku teks pelajaran sejarah SMA masa Orde Baru dan Reformasi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini secara umum ingin mengetahui bagaimana bentuk narasi pendidikan nasionalisme yang muncul dalam penulisan buku teks pelajaran sejarah SMA yang terbit pada masa dua pemerintahan berbeda, yaitu pemerintahan Orde Baru yang sentralistik dan pemerintahan Reformasi yang mengusung kebebasan berdemokrasi di Indonesia. Secara lebih khusus tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengembangkan analisis terhadap landasan kebijakan politis dan landasan filosofis pendidikan dalam penelitian buku teks pelajaran sejarah yang merupakan sintesa beberapa pendapat/pandangan yang berpengaruh pada landasan pendidikan, khususnya pendidikan sejarah di Indonesia.

2. Menemukan mekanisme cara kerja penulis buku teks pelajaran sejarah dalam mengembangkan isi kurikulum yang berlaku. Hal itu menyangkut buku teks sebagai sumber data yang harus sesuai dengan kompetensi dasar yang didalamnya ada pengetahuan tentang konten/peristiwa dan aspek berpikir/kognitif peserta didik. Keterkaitan mempelajari peristiwa masa lalu dalam kehidupan masa kini (sekarang) dalam buku teks pelajaran sejarah menjadi kompetensi keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik.
3. Menemukan bentuk konstruksi pendidikan nasionalisme yang dituliskan dalam narasi isi buku teks pelajaran sejarah SMA masa pemerintahan Orde Baru dan pemerintahan Reformasi. Hal ini menyangkut makna narasi-narasi dalam buku teks pelajaran sejarah yang diinterpretasikan telah sesuai dengan indikator-indikator pendidikan nasionalisme.
4. Menemukan bentuk pendidikan nasionalisme yang mendominasi penulisan buku teks pelajaran sejarah SMA masa pemerintahan Orde Baru dan pemerintahan Reformasi di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dalam disertasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik teoretis maupun praktis bagi dunia pendidikan, khususnya dalam pendidikan sejarah melalui pengembangan penulisan buku teks sejarah di Indonesia. Berkaitan dengan hal itu, secara khusus penelitian ini diharapkan bermanfaat:

1. Secara teoretis untuk mengungkap dasar-dasar filsafat pendidikan yang mempengaruhi pendidikan sejarah di Indonesia dari masing-masing pemerintahan (Orde Baru dan Reformasi) yang nantinya ditanamkan melalui penulisan buku teks pelajaran sejarah SMA sesuai dengan versi atau kepentingan pemerintah yang berkuasa.
2. Memberikan kontribusi bagi pengembangan pendidikan sejarah, khususnya dalam menanamkan nilai-nilai nasionalisme melalui wacana buku teks pelajaran sejarah. Hal ini sesuai dengan paradigma pendidikan sejarah yang tidak hanya mengajarkan masa lalu, tetapi bagaimana sejarah memberikan pelajaran bagi kehidupan sekarang dan masa yang akan datang.
3. Kegunaan praktis, diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengambil kebijakan dalam meningkatkan kualitas penulisan buku teks pelajaran

sejarah SMA dan bagi guru-guru sejarah di lapangan (sekolah) dapat lebih terbuka dalam memanfaatkan buku teks pelajaran sejarah sebagai sumber belajar yang sesuai dengan tujuan pendidikan sejarah.

E. Struktur Organisasi Disertasi

Pada Bab I Pendahuluan yang menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Pada subbab latar belakang antara lain dijelaskan berbagai hal yang mendorong peneliti perlu melakukan penelitian ini. Rumusan masalah menguraikan permasalahan utama dan pembatasan masalah yang dikaji dalam penelitian. Tujuan penelitian menunjukkan hasil yang diperoleh setelah penelitian selesai dilaksanakan sesuai dengan permasalahan penelitian yang diajukan. Adapun manfaat penelitian menjelaskan dampak dari pencapaian tujuan secara teoritis dan secara praktis.

Bab II Kajian Kepustakaan, menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kajian teoritis dan kajian empiris sebagai bahan referensi penelitian. Untuk itu, dalam kajian kepustakaan dijelaskan hal-hal yang berhubungan dengan buku teks, paradigma pendidikan sejarah, perkembangan kurikulum mata pelajaran sejarah, wacana dan ideologi, serta kajian penelitian terdahulu yang berisi hasil-hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Ditelusuri juga hasil-hasil penelitian melalui jurnal-jurnal terbitan nasional dan internasional yang terindeks.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini secara garis besar menguraikan penelitian yang terkait dengan penelitian kuantitatif. Dalam bab ini dijelaskan mengenai subjek penelitian, teknik pengumpulan data (dokumentasi/arsip), analisis data, serta alur penelitian yang dilakukan. Metode khusus yang dibahas dalam penelitian ini adalah analisis isi wacana dengan mengkaji isi teks buku pelajaran sejarah SMA yang pernah diberlakukan pada masa pemerintahan Orde Baru dan Reformasi dari tahun 1975 sampai 2015.

Bab IV Temuan dan Pembahasan. Bab ini terbagi ke dalam dua bagian, *pertama* hasil temuan dengan memaparkan deskripsi landasan kebijakan pendidikan sejarah dari dua pemerintahan yang pernah berkuasa, yaitu pemerintahan Orde Baru dan pemerintahan Reformasi, menjelaskan bagaimana penulis sejarah menjabarkan wacana pendidikan nasionalisme dalam materi/konten pada buku teks pelajaran sejarah SMA sesuai dengan perkembangan kurikulum

yang pernah diberlakukan di Indonesia. Kurikulum yang dimaksud adalah Kurikulum 1975, Kurikulum 1984, Kurikulum 1994, Kurikulum 2006, dan Kurikulum 2013. *Kedua* pembahasan hasil penelitian dengan melakukan analisis isi wacana secara kuantitatif dan kualitatif terhadap konstruksi wacana pendidikan nasionalisme yang ditanamkan dalam penulisan buku teks pelajaran sejarah SMA masa Orde Baru dan Reformasi di Indonesia dengan fokus ekspresi narasi sesuai dengan indikator pendidikan nasionalisme yang telah ditetapkan.

Bab V Kesimpulan, Implikasi, Rekomendasi dan Teori berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan. Di sini diuraikan kesimpulan dari hasil temuan dan pembahasan, implikasi bagi penulisan buku teks pelajaran sejarah SMA, dan saran rekomendasi yang ditujukan kepada guru sejarah, sekolah, perguruan tinggi, dan pemerintah mengenai penulisan buku teks pelajaran sejarah yang seharusnya sesuai kaidah akademik. Sementara itu teori dalam konteks penelitian ini adalah sejumlah pendapat peneliti yang didasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan serta temuan yang didukung oleh data serta argumentasi peneliti.